Globethics Repository



Harmoni Kehidupan Sosial Beda Agama dan Aliran di Kudus

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Rosyid, Moh.
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-03 01:18:13
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/155627

ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

HARMONI KEHIDUPAN SOSIAL BEDA AGAMA DAN ALIRAN DI KUDUS

Moh. Rosyid
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Terjadinya konflik antar dan intern umat beragama menghiasi pemberitaan media massa cetak dan elektronik setiap jengkal detik di negeri ini. Konflik tersebut dipicu oleh hal-hal yang sangat sederhana hingga persoalan besar di tengah masyarakat. Bahkan, sudah menjadi kelaziman jika sebuah desa terdapat multi-pemeluk agama atau aliran dalam agama, sudah hampir dipastikan yang terjadi konflik, baik konflik terbuka, semi terbuka, maupun konflik tertutup. Hal tersebut bukan berarti terjadi "pukul rata" bahwa selalu terjadi konflik jika terdapat sebuah komunitas yang terdapat multi-pemeluk agama. Sebagaimana terjadi di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada 2012, warga berjumlah 4.327 jiwa, mayoritas muslim, umat Kristiani 16 orang, Buddhis 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 14 KK yang berada di satu kelurahan dan masing-masing memiliki tempat ibadah yang saling berdekatan, tetapi penuh dengan kedamaian. Interaksi yang positif terwujud di Desa Colo karena terciptanya harmoni interaksi sosial, terwujudnya empati sosial, dan terantisipasinya perilaku agresif. Semua itu terwujud karena kesamaan kepentingan untuk menjunjung tinggi kesederajatan sebagai sesama umat manusia. Faktor pendukung kerukunan terwujud karena antar pemeluk agama dan atau intern

agama yang berbeda aliran terdapat hubungan persaudaraan (genealogis), terjadi simbiosis mutualisme di bidang perekonomian, pemahaman dalam batin antar pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran diwujudkan dalam kehidupan dengan mengedepankan persamaan kebutuhan dan menafikan konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan agama, pola pikir antar pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjauhkan dari sikap negatif. Tidak terjadi konflik antar pemeluk agama dan aliran karena tidak adanya loko dan pemicu konflik, sumber konflik tertangani, perilaku agresif yang terantisipasi, dan faktor pemicu kekerasan teredam. Kerukunan sebagai kebutuhan bersama yang difasilitasi secara bersama-sama antara warga, tokoh, dan perangkat pemerintahan. Warga mayoritas tidak mudah tersulut pemberitaan media dan gosip yang tertebar setiap saat untuk menerkam yang minoritas. Terwujudnya toleransi beragama antar dan intern umat beragama dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendekatan budaya dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, pendekatan yang menggunakan aspek keamanan secara alami ternafikan.

Kata Kunci: Nirkonflik, Antar Umat dan Intern Umat Beragama, Aliran Agama.

Abstract

HARMONY OF SOCIAL LIFE OF DIFFERENT RELIGION IN KUDUS. Internal and interreligious conflict has colored social reality in this country. The most important thing to solve the problem is finding its fundamental cause. However, religious life among the society does not necessarily mean conflict or religious differences is not identical with conflict. Research conducted 2012 in Colo Village, Dawe, Kudus, Central Java shows that people from different religious background has created harmony among themselves. This research uses observation and interview to collect data from the research field and applies descriptive qualitative analysis. In 2012 the population in Colo is 4.327 people consisting of 2.400 family in which the majority are Moslem. There are also 16 Christians, 40 Buddhists and 14 Ahmadiyah's family living in one village. All religious adherents build their own sacred places consisting of five mosques (the Muria Mosque in Muria Mountain built by the Central Java Provincial government, two mosques in Colo village and a mosque built by Ahmady people), 11

mushalla (Muslim prayer house) spread in four hamlet of Colo, a church beside a vihara. The vihara was built during Gus Dur's presidency. In addition, there are two private Islamic schools, two elementary schools, a private junior Islamic high school (MTs), a private senior Islamic high school (MA), three Quranic learning centers, a kindergarten and an Islamic playgroup. Religious harmony among the society in Colo is established through social and cultural life in which most of them has good income. They are not easily triggered by conflict and there is no such conflict trigger, moreover they have a strong family ties among people from different religious background.

Keywords: Nirconflict, Internal and Interreligious Conflict, Ideology of Religion.

A. Pendahuluan

Presiden SBY saat memberi sambutan dalam peresmian sarana dan prasarana Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 27 Juni 2011 meminta umat dibimbing untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang benar, agar persoalan yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam dapat teratasi dan menjalankan syariat dengan sesungguhnya. Misalnya, apa pengertian jihad yang benar menurut Islam, apakah benar ketika membunuh saudaranya yang tidak bersalah, surga balasannya, termasuk aksi bunuh diri. Saat ini umat Islam di dunia menghadapi tiga tantangan besar yakni ketidakadilan, persepsi tidak benar mengenai Islam, serta penyimpangan pelaksanaan ajaran Islam oleh segelintir orang. Umat Islam harus gigih memperjuangkan keadilan hakiki dengan cara cerdas dan tepat tanpa menimbulkan masalah baru yang bisa merugikan nama Islam. Persepsi keliru tentang Islam diatasi dengan usaha terus-menerus dari umat Islam untuk berdialog dengan semua pihak yang selama ini salah mengerti tentang Islam, sehingga tokoh muslim harus aktif mengemban tugas tersebut. Tidak ada pilihan selain memperkuat bimbingan terhadap umat.[1] Presiden SBY juga mengajak tokoh agama, ulama, dan pemimpin

[1] *Kompas,* 28 Juni 2011, hlm. 4.

ormas Islam di Tanah Air untuk membimbing umatnya dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, membangun akhlak mulia dan sikap positif (perilaku damai, ramah, dan toleran) dalam menghadapi tantangan global dengan merujuk pada Alquran dan hadis. Nilai islami dan *spirit qurani* perlu menjadi rujukan pergaulan internasional, terutama di tengah arus pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan saat ini. Perlunya mengaktualkan dan memberi kontribusi dalam membangun tatanan dunia yang makin aman, adil, damai, dan sejahtera. Cegah dan lindungi kaum Muslim dari pemahaman yang keliru dan menyimpang, apalagi yang menyuburkan radikalisme serta menyakiti kelompok tertentu hingga menimbulkan tindakan kekerasan.[2] Presiden SBY menjelang pergantian tahun mengajak masyarakat untuk memperkokoh persaudaraan dan kerukunan berbangsa. Diharapkan tidak terjadi lagi kekerasan pada tahun 2012. Bahkan berkali-kali SBY menyatakan prihatin dan mengimbau supaya tak ada lagi kekerasan, tetapi tidak ada langkah kongkret. Imbauan SBY menurut Hendardi, Badan Pekerja *Setara Institute*, dianggap sekedar kata-kata politik yang tidak ada gunanya untuk masyarakat. Konflik terjadi akibat kebijakan negara yang tidak memberi keadilan dan perlindungan kepada warganya, penegakan hukum dan regulasi tidak berjalan, akar masalahnya terdapat pada kepemimpinan politik.[3]

Tahun demi tahun tidak menggembirakan dalam soal kerukunan umat beragama, baik intern maupun antarumat beragama dan umat berkeyakinan di negeri ini. Masalah tersebut berakar pada banyak persoalan, dari dalam dan dari luar agama. Sebagian kelompok memperoleh pemahaman yang sempit tentang agama. Mereka juga kurang mengenal keragaman budaya alias kemajemukan. Faktor luar berasal dari banyak masalah yang membelit masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau masalah lingkungan. Pemerintah dinilai oleh masyarakat belum mampu membangun

[2] *Kompas,* 28 Juni 2011, hlm. 4.
[3] *Kompas*, 3 Januari 2012, hlm. 4.

negeri yang sumber daya alamnya melimpah. Penegakan hukum yang lemah, bahkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin subur. Tren kekerasan di Indonesia meningkat, toleransi beragama semakin terkikis dan radikalisasi agama kian menguat yang terlihat dari merosotnya toleransi terhadap kelompok atau agama lain. Penyebab intoleransi juga akibat tidak ada lagi tokoh masyarakat atau pemimpin yang dihormati. Dulu masyarakat kuat karena ada inisiatif pemimpin lokal, munculnya otoritas tradisional secara turun-temurun karena kharisma pemimpin dalam wujud tokoh adat yang berperan mendamaikan konflik. Kini, semenjak lurah dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) bagian dari birokrasi sehingga kehilangan ruh dan legitimasinya memudar.

Terdapat realitas yang menarik kaitannya dengan respon publik yang resisten terhadap Islam radikal. Masyarakat menilai, keberadaan kelompok radikal aktivitasnya mengakibatkan munculnya citra negatif terhadap agama dan umat Islam, bahkan sangat sedikit anggota masyarakat yang bersedia mendukung kelompok radikal. Dialog lintas agama seyogyanya jangan hanya berlangsung di tingkat elit dan bersifat retorika, tetapi dikembangkan hingga menjadi gerakan masyarakat awam dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan nyata. Inti penting untuk mengurangi ketegangan atau konflik antarumat beragama. Wacana dialog lintas agama sudah didengungkan oleh pemerintah dan tokoh agama di Indonesia. Namun, selama itu pula, konflik dan kekerasan atas nama agama masih berlangsung karena dialog itu masih menjadi wacana elit.

Bila Negara tak mampu mengendalikan kebrutalan warga negara maka eksistensi negara menjadi sorotan penegak HAM dunia. Tahun 2005, Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Itu berarti demi hukum Negara RI terikat untuk memenuhi semua kewajibannya, kecuali terhadap Pasal 1 yang direservasi. Untuk mengawasi agar semua negara peratifikasi UU -disingkat KIHSP- mematuhi kewajibannya yakni menghormati dan melindungi

semua hak yang tertuang dalam kovenan, PBB mendirikan Komite HAM. Dalam konteks itu, negara pihak KIHSP harus menyampaikan laporan kepada komite di atas terkait langkah dan kemajuan yang dicapai untuk mewujudkan semua hak yang termuat dalam kovenan. Laporan itu disampaikan dalam satu tahun sejak berlakunya KIHSP di Negara yang bersangkutan dan selanjutnya setiap diminta komite.

Di bawah KIHSP ada 24 hak sipil dan politik yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Hal itu antara lain hak menentukan nasib sendiri, persamaan hak laki-laki dan perempuan, hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya, hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, hak politik, hak atas kedudukan yang sama di depan hukum, hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa, dan hak sipil politik lainnya.

Indonesia menyajikan laporan pada 2013 dan Komite HAM PBB menanyakan 10 poin: (1) remedia apa yang tersedia bagi para korban pelanggaran HAM?; (2) apakah para anggota militer yang melakukan tindak pidana biasa diadili pengadilan militer yang tidak independen dan transparan?; (3) langkah apa untuk mengimplementasikan akses ke keadilan yang diluncurkan pada tahun 2009?; (4) apa tindakan pemerintah untuk memastikan UU dan perda sesuai dengan KIHSP?; (5) apa yang dilakukan pemerintah untuk menyidik kasus penggunaan senjata berlebihan dalam menghadapi para pemrotes di Papua, dengan sejumlah pemrotes meninggal dunia? Sebanyak 70 pembunuhan di luar hukum terjadi di Papua, mengapa tidak ada pelaku yang diadili?; (6) mengapa hukuman mati secara sistematis dikenakan pada para terpidana narkoba?; (7) mengapa pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang membatasi hak-hak komunitas Ahmadiyah?; (8) apa langkah pemerintah untuk mewujudkan Badan Pemantau Independen atas fasilitas dan kondisi tempat-

tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan?; dan (9) apakah KIHSP secara langsung diterapkan pengadilan?; (10) apa ruang lingkup reservasi atas Pasal 1 KIHSP oleh Indonesia?. Hal ini menandakan bahwa perlakuan negara terhadap 10 hal yang diterima warga Negara sebagaimana di atas dipantau Komite HAM PBB.

Akan tetapi, bukan berarti semua wilayah negeri ini selalu terjadi konflik intern atau antarumat beragama karena adanya mayoritas menghadapi minoritas. Sebagaimana di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah desa di mana *waliyullah* Sunan Muria disemayamkan. Topografi wilayah ini pegunungan dengan adanya Gunung Muria. Jumlah penduduk 4.327 jiwa, 3020 pemilik hak pilih, mayoritas pemeluk Islam, Kristen 16 orang, Buddha 40 orang, dan pemeluk aliran Ahmadiyah 14 KK yang berada di satu kelurahan dan masing-masing memiliki tempat ibadah yang terdiri 5 masjid (Masjid Sunan Muria di Gunung Muria, masjid yang dibangun pemerintah provinsi Jateng yang berada di wilayah wisata pegunungan Colo, Muria, 2 masjid di perkampungan Desa Colo, dan 1 masjid warga Ahmadiyah), 11 musala di perdukuhan Desa Colo, 1 gereja yang bersebelahan dengan Vihara. Vihara dibangun era kepresidenan Gus Dur. Beberapa tempat ibadah tersebut saling berdekatan, masing-masing umat menjalankan peribadatan dengan penuh kedamaian.

Muncul pertanyaan yang terumuskan dalam permasalahan: (1) bagaimana interaksi antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?; (2) faktor apakah yang mendukung terjadinya kerukunan antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kec. Dawe, Kab. Kudus?; (3) mengapa tidak terjadi konflik antar-pemeluk agama dan aliran di Desa Colo, Kec. Dawe, Kab. Kudus? Naskah ini teknik perolehan data dengan wawancara dan observasi dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan tahun 2012 dengan harapan harmoni sosial di Desa Colo yang terdiri multi-pemeluk agama dan aliran tetap terwujud dengan baik dapat dipotret.

B. Pembahasan

1. Data Intoleransi

Berdasarkan data *Institut Titian Perdamaian*. Pada 2008 rata-rata terjadi 1,5 kekerasan per hari yang meningkat menjadi 4 kasus per hari pada 2010 dan konflik tak selalu bernuansa agama, tetapi bertumpu pada motif politik (pesta demokrasi lokal) dan sumber daya alam (implementasi otda). Dari 600 kasus kekerasan pada 2009, hanya 6 berbau agama dan hingga semester pertama 2010, kekerasan berbau agama hanya 10 kasus dari 752 peristiwa yang terdata secara nasional. Berdasarkan persentase, konflik politik meningkat dari 12 persen pada 2009 menjadi 16 persen per Juni 2010. Adapun konflik SDA dari 9 menjadi 10 persen. Penyebaran konflik merata, di DKI terbanyak konflik horizontal dengan 110 kasus pada 2009 dan 89 kasus hingga pertengahan 2010, Jatim 87 kasus, Sulsel 76 kasus, Jabar 66 kasus, Maluku 47 kasus, NTB 41 kasus, Sul Tenggara dan Jateng 34 kasus, Sumut 32 kasus, Sumsel 30 kasus, dan Papua 29 kasus (*Republika*, 3/3/2011, hlm.23). Berdasarkan data catatan akhir tahun 2011 dari *Setara Institute* terjadi 103 tindakan negara melalui institusi dan 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan di lima provinsi yang masuk daftar tertinggi pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Di Jawa Barat sebanyak 57 peristiwa, Sulawesi Selatan 45 peristiwa, Jatim 31 peristiwa, Sumut 24 peristiwa, Banten 12 peristiwa, Jateng 11 peristiwa. Peristiwa tersebut berkaitan dengan kasus Ahmadiyah, perusakan rumah ibadah, pemaksaan keluar dari keyakinan, ancaman penyerangan, dan perusakan rumah. Ketua *Setara Institute*, Hendardi, menyatakan bahwa Presiden SBY telah 19 kali berpidato untuk menyampaikan pesan toleransi, tetapi pelanggaran terhadap kebebasan beragama justru meningkat.[4]

Hasil Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta tahun 2000-2010 terhadap 1.200 responden yang berusia di atas 17 th di seluruh Indonesia secara acak

[4] *Suara Merdeka*, 20 Desember 2011, hlm. 2.

dengan memperhitungkan keterwakilan kelompok masyarakat. Materi yang ditanyakan adalah bagaimana umat Islam jika hidup berdampingan dengan kelompok atau agama lain secara setara, sebagian besar menjawab keberatan. PPIM menawarkan solusi berupa dialog lintas-agama, pemerintah harus menegakkan hukum, keamanan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.[5] Dalam laporan *Pew Research Center's Forum on Religions on Religion* (2011) lembaga nonpartisan internasional yang meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik bahwa lebih dari 2,2 miliar manusia (lebih kurang sepertiga penduduk dunia) mengalami pelarangan/pembatasan (*restriction*) dan kebencian (*hostilities*) kehidupan beragama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen), baik oleh negara maupun masyarakat. *Pew Research* menyumbangkan *The Government Restrictions Index* (GRI), indeks yang mengukur tingkat restriksi pemerintah terhadap penganut agama, khususnya dari dari kelompok minoritas- dan *The Social Hostilities Index* (SHI)-mengukur tingkat ancaman, tekanan, kebencian, permusuhan, dan intimidasi oleh individu dan anggota masyarakat terhadap kelompok agama minoritas.[6] Temuan penelitian *The Wahid Institute*, terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada 2010, terdapat 62 kasus dan tahun 2011 terdapat 92 kasus, meningkat 18 persen. Pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah tercatat 49 kasus, tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus, pembiaran kekerasan 11 kasus, kekerasan dan pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah masing-masing 9 kasus, dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus. Institusi negara tercatat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak adalah polisi menempati peringkat pertama dengan 32 kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemda sebanyak 28 kali. Pelaku pelanggaran

[5] *Kompas*, 29 Maret 2011, hlm. 4.

[6] Husni Thoyyar, Husni. "Dunia yang Makin Tidak Toleran", *Kompas*, 22 November 2011, hlm. 7.

lainnya adalah tentara 16, Satpol PP 10, pemprov 8, kantor kemenag dan KUA 8. Jabar merupakan daerah dengan jumlah sebaran wilayah pelanggaran tertinggi yakni 55 kasus, Banten 9 kasus, Aceh 5 kasus, Jatim, Jateng, dan Sulsel masing-masing 4 kasus. Tindakan intoleransi dalam beragama dan berkeyakinan tahun 2010 sebanyak 134 kasus, tahun 2011 sebanyak 184 kasus. Kategori tindakan intoleransi yang paling tinggi adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama agama 48 kasus, penyebaran kebencian terhadap kelompok lain 27 kasus, pembakaran dan perusakan properti 26 kasus, dan diskriminasi atas dasar agama 26 kasus. Pelanggaran kebebasan beragama/intoleransi di Jabar 105 kasus, Jatim 17, Jateng 15, Jakarta 13, dan Riau 9 kasus. Simpulan dari *The Wahid Institute* bahwa pemerintah masih menganggap pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi bukan persoalan serius dan tak pernah serius menanggapi laporan.[7] Kekerasan demi kekerasan itu seakan menjadi potret buram negeri yang terkenal dalam syair lagu sebagai *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo* (damai, makmur, sejahtera, tenteram, dan sentosa). Kekerasan tersebut dalam pepatah Jawa seperti *ajur mumur ambeg angkoro, budhi cendholo* (rusak binasa karena angkara murka akibat rusaknya budi pekerti).

Pada Februari 2011, sekitar 100 orang menyerang warga Ahmadiyah menyebabkan tiga warga ahmadi tewas di Kampung Peundeuy, Pandeglang, Banten. Disusul 3 gereja di Kab. Temanggung, Jateng, dibakar seusai pengadilan kasus penistaan agama oleh oknum yang tak bertanggung jawab karena mereka tak puas atas proses pengadilan dan melampiaskannya dengan merusak rumah ibadah umat agama lain. Pertengahan tahun, muncul isu penculikan dalam usaha perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII). Jaringan baru NII yang didirikan tahun 1949 masih bergerak di bawah tanah, dengan cita-cita mendirikan Negara Islam. Tak hanya mengancam agama lain, mereka hendak mengubah kesepakatan bersama NKRI. Saat isu itu mereda, Kota Ambon, Maluku, rusuh lagi pada pertengahan September 2011.

[7] *Kompas*, 30 Desember 2011, hlm. 5.

Dua kelompok beragama bentrok akibat isu kematian tukang ojek yang menyebar liar. Konflik Ambon terasa terulang tahun 1999 dengan ribuan korban di Ambon dan Maluku. Sementara itu, kasus Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor, Jabar, memanas setelah Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) gereja itu, meskipun Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan atas pembekuan IMB. Ombudsman pun merekomendasikan pembukaan segel gereja Yasmin. Pada 18 September 2011, massa bersurban merusak tiga patung di pusat kota yaitu patung Gatotkaca di Persimpangan Parcom, Patung Semar di Persimpangan Sasak Beusi, dan patung Bima di Pertigaan Jalan Baru. Massa menilai keberadaan patung tak sesuai aspirasi masyarakat dan menghamburkan anggaran daerah. Perusakan terjadi pada pukul 11.30 melibatkan sedikitnya lima ribu orang. Tindakan anarkhis dilerai oleh aparat keamanan gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Massa setelah mengikuti istighosah di Masjid Agung Purwakarta, Jabar. Menurut pimpinan ponpes Ad Duha, Ustad Toto Taufik, aksi merupakan puncak kemarahan warga karena keinginan umat tak digubris.[8] Perusakan sebagai bentuk protes warga terhadap Pemkab Purwakarta yang membangun patung dan menggelar ribuan tumpeng untuk pemecahan rekor Agustus 2011 yang mengabaikan penderitaan rakyat yang diimpit kemiskinan. Pada kasus sebelumnya, Ketua Forum Ulama Indonesia Purwakarta, Abdullah As Joban dan Sekretarisnya, Ahmad Muhaimin, dituntut ke Pengadilan oleh tiga lurah karena dinilai bertanggung jawab atas kerusakan patung Bima di jl.Ibrahim Singadilaga pada Agustus 2010 dengan tuntutan ganti rugi materiil Rp 102 juta dan imateriil Rp 3 miliar.[9]

Hasil survei *Setara Institute* tahun 2011 tentang persepsi publik tentang Islam radikal di Solo, Sukoharjo, Klaten, Temanggung, Karanganyar, Pekalongan, Pemalang, Kendal (Jateng) dan Sleman, Yogyakarta, dan Bantul (DIY). Jumlah responden 1.200

[8] *Jawa Pos*, 19 September 2011, hlm. 10.
[9] *Kompas*, 19 september 2011, hlm. 23.

orang dengan *margin of error* 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, pengambilan sampel melalui *stratified random sampling*, dengan teknik wawancara tatap muka.[10] Data menunjukkan, warga melakukan perlawanan terhadap kelompok radikal, meskipun berita kekerasan masih tetap berlangsung. Sebagaimana peledakan markas FPI di Desa Balecatur, Kec. Gamping, Sleman Jl.Wates Km.8 Yogyakarta pada dini hari, 01.30 WIB, 15/12/2011 mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan dan anggota FPI luka bakar (Agus Susanto, 35 th).[11] Terdapat info yang sedikit melegakan bagi warga bangsa berdasarkan pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mantan Ketum PB NU, K.H. Hasyim Muzadi, dan Rohaniawan, Frans Magnis Suseno bahwa komunikasi antarpemimpin agama di Indonesia tahun 2011 semakin baik, meskipun terjadi sejumlah konflik dan kekerasan atas nama agama. Hal ini bisa menjadi modal yang baik untuk terus membangun kerukunan antarumat beragama di masa mendatang. Tren positif tersebut ditandai dengan kerapnya pertemuan di antara tokoh agama dan lintas agama jika ada masalah yang membutuhkan penanganan bersama karena di setiap agama ada kelompok garis keras yang sulit menerima perbedaan. Saat ini agama sangat rentan dibajak dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan masing-masing, termasuk kepentingan politik. Sebab, umat beragama belum benar-benar memahami permainan politik dan sebagian kehidupannya masih belum sejahtera. Sentimen ideologis agama yang kuat juga mudah untuk diletupkan menjadi gesekan. Kaum agamawan diimbau mencegah kemungkinan itu agar agama tetap menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah bangsa. Pengurus FKUB bersama tokoh agama di daerah didorong membuat jaringan kerukunan antarumat beragama agar tak mudah terpancing untuk masuk dalam gesekan yang akar penyebabnya sebenarnya bukan soal agama.[12]

[10] *Kompas*, 22 Nopember 2011, hlm. 4.
[11] *Suara Merdeka*, 17 Desember 2011, hlm.
[12] *Kompas*, 26 Nopember 2011, hlm. 3.

2. Data Konflik di Kudus

Terjadi konflik yang dapat direda di wilayah Kudus yang berbasis agama. Pertama, warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati melakukan demo yang dilatarbelakangi pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS jalan Agus Salim Kudus untuk dijadikan tempat ibadah (gereja). Ibadah dipimpin pendeta F. Iskandar Wibawa. Pemanfaatan tokoh untuk tempat ibadah menurut warga menyalahi fungsi. Hal tersebut direspon Bupati Kudus menerbitkan surat No.450/7777/11/2006 tanggal 23/11/2006 ditandatangani Asisten Tata Praja, Suyono. Isi surat menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus disiagakan.[13] Ruko tersebut kini tidak digunakan untuk tempat ibadah. Kedua, Jamaah *Dzikrussholikhin* dipimpin oleh Nur Rokhim di RT.06 RW.01 Desa Golantepus, Kec. Mejobo, Kudus. Pada 2007 sang tokoh mengaku bertemu malaikat akibat taatnya berzikir setiap malam, ditemui cahaya mengajak ruh Nur Rokhim singgah rumah mewah, cahaya dianggap malaikat. Sebagian masyarakat Kudus menganggap ajaran Nur Rokhim sebagai ajaran sesat, akibatnya muncul ketegangan suasana desa. Agar tidak terjadi konflik, aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat. Kondisi komunitas itu kini tiarap. Ketiga, penggunaan rumah hunian Sukarjo untuk gereja di Dukuh Conge Rt.5/II, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kudus. Inisiatif Forum Umat Islam Ngembal (FUIN) melayangkan surat keberatan tanggal 30/4/2010 ditembuskan kepada seluruh Muspida Kudus dan Muspika Bae yang ditandatangani 30 ormas dan 1.387 warga Desa Ngembalrejo. Surat tersebut berisi permintaan penghentian aktivitas keagamaan dan membongkar rumah yang dijadikan gereja. Difasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) tingkat Kec.Bae, pada 5 Mei 2010 diadakan dialog antara pemilik rumah, yayasan, dan masyarakat di Balai Desa Ngembalrejo. Dialog menghasilkan kesepakatan menutup sementara kegiatan kebaktian kristiani dan mengurus

[13] *Jawa Pos*, *Radar Kudus*, 27 November 2006, hlm. 1.

izin rumah ibadah sesuai peruntukan dan selama belum terbit izin tak diperbolehkan mengadakan aktivitas keagamaan di rumah itu.[14] Hingga ditulisnya naskah ini, rumah tersebut tak lagi digunakan untuk peribadatan umat kristiani.

3. Konsep Toleransi Beragama

Rasa sepenanggungan, kesetiakawanan, dan kebersamaan menjadi `barang mahal' di tengah pesan negatif globalisasi dan pemahaman sempit atas kapitalisme. Jika hal ini tertradisi tanpa adanya *reserve* oleh warga bangsa dikhawatirkan menumpulkan perasaan hati antarsesama dan munculnya kesenjangan sosial. Solusi bijak yang perlu dikedepankan adalah pemahaman dari diri untuk diri bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu 'sendiri', tetapi membutuhkan empati dan simpati pihak lain meski beda agama. Tetapi jika memahami diri lain (*the others*) tidak hanya dengan kaca mata diri, juga menggunakan kaca pandang diri lain, sehingga tercipta keseimbangan dan terjauhkan diri dari sakwasangka (buruk sangka, *negatif thinking, su`uddhon*).

Kemajemukan dipahami sebagai kumpulan berbagai elemen sosial yang menyatu dalam lingkungan yang sama, elemen tersebut berpeluang berbeda sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan tidak untuk dijadikan modal konflik, tetapi untuk dipahami bahwa ketidaksamaan dalam berbagai lini adalah produk Ilahi untuk disadari dan disyukuri. Perbedaan sebagai cara memahami diri atas pihak lain sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan kemasyarakatan. Sebagaimana realitas sosial bila terjadi musibah dan saling menolong. Pertolongan tersebut atas dasar sifat kemanusiaan murni, bukan atas dasar kesamaan atau perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Spontanitas menolong sesama tersebut pada dasarnya adalah esensi dari toleransi dan kemajemukan sebagai potensi alamiyah yang dimiliki setiap manusia, kapan pun dan di manapun.

Interaksi sosial positif yakni terciptanya keselarasan sosial,

[14] *Jawa Pos, Radar Kudus*, 8 Mei 2010, hlm.1.

manakala dalam bersesama, manusia mengedepankan sifat seimbang (*at-tawazun*) kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber, masudnya tak latah menghakimi salah, toleran (*at-tasamuh*) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya beda agama atau aliran, dan adil (*al-`adalah*) yakni bersikap tegas jika menjadi penguasa dalam menegakkan hukum. Empati sosial merupakan bentuk kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih menambah kesadaran diri (*self-aware autonomy*) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran diri/mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dapat saling melengkapi.[15]

4. Interaksi antar-Pemeluk Agama dan Aliran

Hubungan antar-individu dengan individu dan antara individu dengan kelompok meskipun berbeda agama dan aliran tercipta dengan baik dan terwujud sejak lama di Desa Colo karena terciptanya harmoni interaksi sosial, terwujudnya empati sosial dan terantisipasinya perilaku agresif. Pertama, harmoni interaksi sosial yakni terciptanya keselarasan sosial di tengah masyarakat. Hal ini dapat terwujud manakala dalam bersesama, manusia mengedepankan sifat keseimbangan (*at-tawazun*) kaitannya dengan menerima informasi dari berbagai sumber, maksudnya tidak latah menghakimi salah pada pihak lain, toleran (*at-tasamuh*) maksudnya memahami dan menghormati di tengah perbedaan, khususnya berbeda agama atau aliran, dan adil (*al-`adalah*) yakni bersikap tegas jika menemukan kesalahan, baik pelaku kesalahan dari golongannya maupun golongan lain. Di sisi lain, penguasa dalam memegang amanat kepemimpinan bersifat tegas dan melindungi agar terwujud pengayoman hukum bagi warga. Konsep harmoni ini terealisasi di Desa Colo karena karakter frontal tidak dimiliki oleh warga Desa Colo jika berhadapan dengan pemeluk agama lain. Hal ini akibat lingkungan sosial

[15] Maya Dania, "Empati dan Identitas Sosial". *Kompas*, 22 Desember 2011, hlm. 7.

yang rukun berperan besar mewujudkan kenyamanan sosial dan sumber perekonomian warga eksis.

Kedua, terwujudnya empati sosial. Kesadaran identitas sosial dalam meningkatkan kapasitas empati dilakukan dengan kesadaran diri (*self-aware autonomy*) dan mengurangi tendensi mengklaim apa yang benar dan apa yang salah. Kesadaran diri atau mawas diri bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. Hal ini dapat diwujudkan warga Desa Colo karena kehidupan sebagai petani gurem, pedagang kaki lima, dan tukang ojek obsesinya hanyalah kenyamanan sosial, tanpa adanya kompetisi politik dan lainnya.

Ketiga, terantisipasinya perilaku agresif. Perilaku agresif terjadi karena adanya alasan manusia melakukan kebengisan dan berperilaku agresif. Model dua perilaku terseut dari aspek faktor internal karena mengalami kemampatan berpikir yang cenderung menempuh jalan kekerasan untuk menegakkan eksistensinya atau sekadar mempertahankan hidup. Kekerasan hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustasi sosial akibat beban hidup yang makin berat sehingga menjadi semacam legitimasi seseorang melakukan kekerasan. Hal itu didukung hukum tidak mengakomodasi keadilan dan hukum tidak berwibawa, sistem pemerintahan yang korup, ketidakadilan sosial mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[16]

Faktor pemicu kekerasan, secara sosiologis terdapat tiga faktor pemicu kekerasan yakni keyakinan, institusi, dan ritualisme. Pola kekerasan di Indonesia muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki fase dan episode masing-masing. Pemicu kekerasan berupa keyakinan; menurut Arie Sudjito (2011) agama memiliki tiga level yakni *believe system*, institusional, dan ritualisme. Ketika agama berada pada level sistem keyakinan maka tidak ada persoalan. Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran tentang kebenaran (*truth claim*) yang memunculkan

[16] Surahmat. "Menakar Kekerasan Diri Kita", *Kompas*, 28 Mei 2011, hlm. 12.

konflik. Problem struktural dan ketidakmapanan (kesenjangan) bidang ekonomi, pemahaman keagamaan, dan politik yang menafikan budaya lokal, dan ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan kekerasan.[17] Pemicu kekerasan tersebut dapat ditoleransi warga antar-umat beragama karena bermodalkan kesadaran dan saling memahami di tengah perbedaan.

Terantisipasinya sumber konflik. Terjadinya konflik di Indonesia sering dipicu oleh persoalan sederhana, seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut Ichsan Malik, ada lima sumber konflik di Indonesia: (a) konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan; (b) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari satu kelompok yang mengorbankan kelompok lain (persaingan tidak sehat); (c) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena pemaksaan nilai pada pihak lain; (d) konflik hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi; (e) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi.[18] Sumber konflik juga akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tak dituntaskan, sebagaimana kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. Kelima sumber konflik tersebut tereliminasi secara alamiah oleh warga Desa Colo karena kokohnya ikatan primordial geneologis, meskipun berbeda akidah atau agama.

[17] El-Fikri, Syahruddin. *Rumput Kering Bernama Indonesia, Republika*, 3 Maret 2011. hlm. 23.

[18] Surahmat. *Menakar Kekerasan Diri Kita, Kompas*, 28 Mei 2011. hlm. 12.

5. Faktor Pendukung Kerukunan antar Pemeluk Agama dan Aliran

Faktor pendukung kerukunan beragama terwujud karena: antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terdapat hubungan persaudaraan (geneologis), terjadi simbiosis mutualisme di bidang perekonomian, pemahaman dalam batin antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran diwujudkan dalam kehidupan dengan mengedepankan persamaan kebutuhan dan menafikan konflik yang lazimnya dipicu oleh perbedaan keyakinan dan agama, pola pikir antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjauhkan dari sikap negatif.

Pertama, antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terdapat hubungan persaudaraan (geneologis). Imbasnya lebih mengedepankan ikatan persaudaraan yang berimbas saling memahami perbedaan agama dan perbedaan aliran kepercayaan. Bila muncul bintik-bintik konflik berbasis agama, peran orang tua atau sesepuh dalam rumpun keluarga berperan sebagai mediator. *Kedua*, antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjadinya simbiosis mutualisme di bidang perekonomian yakni mitrakerja. Sebagai contoh, umat kristen pemasok bahan baku mainan anak-anak, warga Ahmadiyah memproduk mainan anak-anak, dan warga *nahdliyin* berperan sebagai pemasar produk. Begitu pula dalam hal pertanian dan perladangan. *Ketiga*, pemahaman dalam batin antar-pemeluk agama dan atau intern umat beragama yang berbeda aliran diwujudkan dalam kehidupan dengan mengedepankan persamaan kebutuhan dan menafikan konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan agama. Hal itu tercipta karena dukungan poin pertama dan kedua. Keempat, pola pikir antar-pemeluk agama dan atau intern agama yang berbeda aliran terjauhkan dari sikap negatif. Hal ini tercipta karena: (a) keeratan kehidupan antar-pemeluk agama dan aliran di desa pegunungan. Keeratan tersebut tergapai karena penghidupan ekonomi warga berupa petani, peladang, tukang ojek sepeda motor di area wisata makam

Sunan Muria, dan pedagang kaki lima di area wisata Colo. Profesi tersebut membutuhkan keeratan hubungan sosial dan saling membutuhkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan pribadi yang membutuhkan kiprah lingkungannya; (b) frekuensi komunikasi antar-individu rapat, sehingga dapat menepis jika terjadi gosip atau jika terpicu konflik dapat teratasi sedari dini. Seperti forum RT-nan, RW-nan, lembaga BPD, PKK, dsb. Kelima, warga minoritas mengikuti acara budaya yang bernuansa ritual keagamaan jika diundang menghadiri acara warga mayoritas, seperti hajatan untuk doa kematian, hajatan menantu, dan hajatan lain. Begitu pula sebaliknya, warga pemeluk agama mayoritas akan memenuhi hal yang sama karena sepenanggungan. Keenam, warga mayoritas dan minoritas saling memberi dukungan dana dan tenaga jika diminta panitia pembangunan tempat ibadah masing-masing. Hal ini terjadi karena poin 1 s.d 5 telah mapan di tengah kehidupan warga. Ketujuh, terdapat dalam sebuah rumah tangga, memiliki penghuni yang multi-agama. Hal ini dianggap hal wajar bagi warga Desa Colo karena prinsipnya bahwa yang menentukan kebajikan atau ketidakbajikan seseorang adalah perilaku baiknya pada sesama, bukan keagaman semata.

6. Tidak Terjadi Konflik antar Pemeluk Agama dan Aliran

Tidak terjadi konflik antar-pemeluk agama dan aliran karena tidak adanya loko dan pemicu konflik, sumber konflik tertangani, perilaku agresif yang terantisipasi, dan faktor pemicu kekerasan teredam. Pertama, tidak adanya loko dan pemicu konflik. Hal ini yang terjadi berbeda jika dibandingkan di wilayah Kudus selain Desa Colo. Warga Kudus ketika dihadapkan dengan aktivitas yang dianggap lain responnya berupa penolakan, seperti pemanfaatan rumah toko (ruko) untuk gereja, pernyataan kelompok tarekat yang dianggap 'mengganggu' kenyamanan umat beragama, dan penggunaan rumah untuk gereja.

Begitu pula adanya aliran sesat Sabda Kusuma yang mendapat fatwa sesat MUI Jawa Tengah, direspon negatif dalam berbagai bentuk: (a) Dibentuk Tim Menara untuk merespon dan menindaklanjuti terjadinya kesesatan di kawasan Menara,

Masjid al-Aqsha, Menara Kudus, Desa Kauman, Kec. Kota, Kudus berupa meneliti, menggali, dan memverifikasi data dan fakta sehubungan dengan informasi seputar Sabda Kusuma. (b) Barisan Serba Guna (Banser) NU Kudus berorasi di alun-alun simpang tujuh, Kudus. Tetapi karena hujan, orasi damai dilanjutkan ke Mapolres Kudus untuk memotivasi perwakilannya (Tim Masyarakat Menara) yang beraudiensi dengan Kapolres Kudus. Hasil audiensi, diadakan pertemuan antara unsur Kemenag Kudus, MUI Kudus, Kesbangpolinmas Kudus, Polres dan Kodim Kudus, pihak Tim Masyarakat Menara (TMM), dan pihak Sabda Kusuma. (c) Adanya pernyataan dari Ketua Pengurus Cabang NU Kudus, M. Chusnan, pihak terkait perlu segera menindaklanjuti kebijakan terhadap Sabda Kusuma karena masyarakat resah atas keberadaannya. Menurut Juru Bicara Tim Menara, Maesah Anggni, warga yang menjadi saksi kasus Sabda Kusuma, mendapat teror berupa telepon yang diduga datangnya dari pihak Sabda Kusuma berupa caci maki dan pernyataan bahwa warga Kauman Kudus tak berani. Diduga teror datangnya dari pihak lawan (Sabda Kusuma) sehingga warga Kauman resah.[19] (d) Pernyataan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kab. Kudus, Budiono, yang juga Wabup Kudus bahwa persoalan Sabda Kusuma diserahkan pada MUI Kab. Kudus. FKUB akan merapatkan barisan menyikapi hal tersebut.[20] (e) Kusmanto diharuskan meninggalkan wilayah Kauman Kudus setelah 5 tahun kontrak di rumah warga Kauman, Kec. Kota. Rapat dihadiri Kusmanto, Kepala Kelurahan Kauman, Rofiqul Hidayat, Ketua BPD, Achmad Chanafi, dan tokoh masyarakat Menara, Em Nadjib Hasan.[21]

Deklarasi Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Kudus pada 28 Januari 2012 dibubarkan paksa oleh ormas Islam (IPNU, IPPNU, GP Ansor, Banser, Fatayat, dan PMII Kudus) dengan dalih menyimpang dari *frame* Islam sebagaimana disaksikan

[19] *Jawa Pos*, *Radar Kudus*, 13 Desember 2009, hlm. 2.
[20] *Jawa Pos*, *Radar Kudus*, 13 November 2009, hlm. 1.
[21] *Suara Merdeka, Suara Muria*, 24 November 2009, hlm. 1.

penulis. Ada pula komunitas aliran beragama yang difatwa sesat MUI pusat tetapi tidak ditolak oleh warga Kudus secara terbuka yakni Ahmadiyah yang berada di Desa Colo. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama yang menganggap sesatnya Ahmadiyah yang diterbitkan oleh tiga lembaga negara yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Nomor 3/2008; Nomor 199/2008; dan Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 pada 9 Juni 2008.

Kedua, sumber konflik tertangani. Terjadinya konflik di Indonesia sering dipicu oleh persoalan sederhana, seperti pertikaian sekelompok pemuda, kekalahan persahabatan dalam olah raga, dsb. Hal itu jika tidak diantisipasi akan menyulut konflik. Menurut Ichsan Malik, ada lima sumber konflik di Indonesia: (a) Konflik struktural yakni adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, kebijakan yang tidak adil, kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan; (b) konflik kepentingan yakni pemuasan kebutuhan dan cara memenuhinya dari satu kelompok yang mengorbankan kelompok lain (persaingan tidak sehat); (c) konflik nilai karena perbedaan adat, ideologi, dan implementasi nilai agama sehingga nilai yang tidak sesuai berbenturan. Konflik terjadi karena pemaksaan nilai pada pihak lain; (d) konflik hubungan sosial psikologis yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan stigmatisasi; (e) konflik data yang diakibatkan kurangnya data dan informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, dan perbedaan interpretasi suatu masalah yang menyebabkan distorsi informasi.[22] Sumber konflik juga akibat warisan kasus yang belum tuntas. Hal ini posisinya bagaikan api dalam sekam jika tidak dituntaskan, sebagaimana mencuatnya kasus Ahmadiyah di berbagai daerah.

Ketiga, perilaku agresif yang terantisipasi. Pada dasarnya alasan manusia melakukan kebengisan dan berperilaku agresif dari aspek faktor internal karena mengalami kemampatan berpikir. Hal ini cenderung menempuh jalan kekerasan untuk menegakkan eksistensinya atau sekadar mempertahankan hidup. Kekerasan

[22] *Republika*, 3 Maret 2011, hlm. 24.

hanyalah cara, ketika tidak ada jalan lain. Ditambah frustasi sosial akibat beban hidup yang makin berat sehingga menjadi semacam legitimasi seseorang melakukan kekerasan. Didukung hukum tidak mengakomodasi keadilan dan hukum tidak berwibawa, sistem pemerintahan yang korup, ketidakadilan sosial mendorong kebrutalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tidak terjadi di Desa Colo karena kehidupan warga Desa Colo disibukkan dengan mengais rizki yang telah terfasilitasi secara alamiah. Mulai dari petani, peladang, tukang ojek di obyek wisata Gunung Muria dan makam Sunan Muria, pedagang kaki lima di area wisata/ziarah.

Keempat, faktor pemicu kekerasan teredam. Secara sosiologis terdapat tiga faktor pemicu kekerasan yakni keyakinan, institusi, dan ritualisme. Pola kekerasan di Indonesia muncul secara sporadis dengan karakter yang berbeda antarwilayah yang memiliki fase dan episode masing-masing. Pemicu kekerasan berupa keyakinan; menurut Arie Sudjito (2011) agama memiliki tiga level yakni *believe system*, institusional, dan ritualisme. Ketika agama berada pada level sistem keyakinan maka tidak ada persoalan. Ketika agama pada institusi agama, muncullah rezim kekuasaan dalam penafsiran tentang kebenaran (*truth claim*) yang memunculkan konflik. Problem struktural dan ketidakmapanan (kesenjangan) bidang ekonomi, pemahaman keagamaan, dan politik yang menafikan budaya lokal, dan ketidakdewasaan kelompok, mudah mencuatkan kekerasan.[23]

Hal tersebut tidak terjadi di Desa Colo karena (1) sumber ekonomi dan strata ekonomi merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi, (2) pemahaman keagamaan warga Desa Colo tidak kategori fanatis karena rata-rata pengetahuan keislamannya tidak eksklusif, (3) tidak adanya kelompok sosial-keagamaan yang menonjol dalam aspek jumlah atau peran sosial, sehingga tidak terjadi kepongahan peran organisasi sosial. Hal ini bukan berarti embrio konflik selalu terpatahkan oleh

[23] Syahruddin El-Fikri, "Rumput Kering Bernama Indonesia", *Republika*, 3 Maret 2011. hlm. 23.

harmoni sosial, sehingga segenap warga, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama pemerintah saling bahu-membahu untuk mengokohkan ikatan solidaritas. Munculnya embrio konflik dan membara menjadi konflik selalu ada dan berada di manapun saja, termasuk di wilayah yang harmoni sosial terwujud. Semua itu memerlukan kesiapsiagaan bersama secara simultan.

C. Simpulan

Kata kunci terwujudnya harmoni kehidupan sosial yang terdiri dari berbagai agama dan aliran dalam agama pada sebuah wilayah sangat dipengaruhi karakter antar dan intern-umat beragama. Karakter tersebut didominasi oleh faktor konflik yang terdeteksi dan terciptanya saling mewujudkan simbiosis mutualisme antar-pemeluk agama. Satu hal yang menimbulkan kenyamanan sosial karena loko penggerak konflik nihil, didukung dengan wilayah kehidupan warga tidak miskin secara materi, hubungan positif antar-pemeluk agama satu ikatan kekerabatan (geneologis), dan tumbuhnya saling menyadari antar-pemeluk agama bahwa hidup tidak untuk menuai konflik, tetapi mewujudkan kenyamanan sosial. Hal itu merupakan modal sosial yang sangat besar manfaatnya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

Prestasi individu dalam berinteraksi sosial ditentukan oleh kepribadian, bukan label agama yang disandangnya. Semangat ini menjadi modal utama yang perlu terus dipupuk agar semakin kokoh, terjauhkan dari kerapuhan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Lie dan Sarah Limuil, *Beyod the Classroom: English for Academic Purposes,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Anthony Campbell, "Religion and Language", dalam *http://www.acampbell.ukfsn.org/essays/skeptic/ language.html,* diakses pada tanggal 6 Juni 2010.

Dania, Maya, "Empati dan Identitas Sosial"*, Kompas*, 22 Desember 2011.

El-Fikri, Syahruddin, "Rumput Kering Bernama Indonesia"*, Republika*, 3 Maret 2011.

H. Douglas Brown, *Principles of Language Learning and Teaching (Fourth Edition)*, New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2000.

Jerry G. Gebhard, *Teaching English as a Foreign or Second Language: a Teacher Self-development and Methodology Guide,* Michigan: The University of Michigan, 2000.

Joseph Ernest Mambu, *Personalizing Critical Pedagogies in Foreign Language Education,* Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2010.

Nusantara, Abdul Hakim G. "RI dan Sidang Komite HAM PBB"*, Kompas*, 26 Juli 2013.

Surahmat, "Menakar Kekerasan Diri Kita"*, Kompas*, 28 Mei 2011.

Thoyyar, Husni, "Dunia yang Makin Tidak Toleran", *Kompas*, 22 November 2011.